

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang imigran ilegal pemilik KTP palsu yang ada di Indonesia dengan fokus pada kebijakan keimigrasian dan kependudukan. Karena pada penerapannya kurang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta pada kebijakan keimigrasian dan kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan hukum imigran ilegal pemilik dokumen kependudukan menurut kebijakan kependudukan di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum terhadap imigran ilegal pemilik KTP palsu berdasarkan keimigrasian di Indonesia. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dampak penggunaan data palsu dalam proses imigrasi ilegal baik dari kebijakan kependudukan dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan pengendalian imigrasi. Metode penelitian ini menggunakan *legal research* (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum imigran ilegal yang menggunakan dokumen kependudukan palsu di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan melanggar hukum serta mengancam keamanan negara, dan merusak administrasi kependudukan. Meskipun sanksi dalam Undang-Undang kependudukan belum jelas bagi imigran ilegal mereka dapat dijerat pasal pemalsuan. Kendala penegakan hukum masih terdapat kekurangan pada pemahaman masyarakat dan ketidakjelasan regulasi terutama terkait penggunaan dokumen kependudukan palsu.

Kata Kunci : Imigran ilegal, Kebijakan Keimigrasian, Kebijakan Kependudukan

ABSTRACT

This research examines illegal immigrants in Indonesia who possess counterfeit identity cards (KTP), focusing on immigration and population policies. The study highlights inconsistencies in the implementation of these policies with prevailing laws. The research questions addressed are: (1) What is the legal standing of illegal immigrants possessing population documents according to population policies in Indonesia? and (2) How is law enforcement against illegal immigrants holding counterfeit identity cards carried out based on immigration regulations in Indonesia? The aim of this research is to identify the impact of using false data in the illegal immigration process from the perspective of population policies and how this affects immigration control policies. This research employs a legal research (normative) method. The findings indicate that the legal standing of illegal immigrants using counterfeit population documents in Indonesia is governed by Law Number 24 of 2013 and Law Number 6 of 2011, which they violate, thereby threatening national security and undermining population administration. Although specific sanctions for illegal immigrants are not explicitly stated in population laws, they can be charged under forgery provisions. Challenges in law enforcement include a lack of public understanding and unclear regulations, particularly concerning the use of counterfeit population documents.

Keywords: *Illegal Immigrants, Immigration Policy, Population Policy*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	
.....ix	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum	20
2.2 Negara.....	21
2.3 Kewarganegaraan	25

2.4 Kependudukan.....	28
2.5 Kartu Tanda Penduduk.....	28
2.6 Keimigrasian.....	30
2.7 Imigran.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1. Kedudukan Hukum Imigran Ilegal Pemilik Dokumen Kependudukan Menurut Kebijakan Kependudukan di Indonesia.....	47
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Pemilik KTP Palsu Berdasarkan Kebijakan Keimigrasian Di Indonesia.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	64
4.2 SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	